



Jangan Tebang Pilih

JOGJA Corruption Watch (JCW) mendukung langkah Pemkot Yogyakarta yang semakin menggencarkan penertiban reklame ilegal. Deputy Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW, Baharuddin Kamba, berharap, upaya tersebut bisa menyasar keseluruhan titik reklame ilegal yang menjamur di Kota Pelajar, tanpa tebang pilih.

"Misalnya, di taman-taman kota yang dijadikan tempat pemasangan reklame, itu kan jelas melanggar aturan," tandasnya, Selasa (13/5).

Apalagi, lanjut Kamba, reklame ilegal berpotensi menimbulkan kerugian negara yang tidak kecil, bisa mencapai miliaran rupiah per tahun. Selaras temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY, hampir setiap tahunnya menemukan potensi kebocoran pajak di sektor reklame.

"Kami mengamati potensi korupsi dalam penataan reklame ilegal, mulai dari per-

izinan, penempatan, hingga penertibannya," tandasnya.

Menurut Kamba, penempatan reklame yang tidak sesuai aturan, atau bahkan ilegal, dapat menciptakan ruang untuk melakukan korupsi. Di samping itu, jika proses penertiban reklame ilegal dilakukan secara diskriminatif dan tebang pilih, terbuka pula peluang terjadinya korupsi.

"Praktik korupsi dalam pengelolaan reklame, termasuk yang ilegal, dapat menimbulkan kerugian negara cukup besar, dari ratusan juta, hingga miliaran rupiah," tegasnya.

Kerugian itu, berupa hilangnya pendapatan daerah dari pajak reklame, biaya penertiban dan kerusakan infrastruktur akibat reklame yang dipasang di taman kota.

"Jika ada kerugian negara karena reklame yang tidak berizin ini, maka APH (Aparat Penegak Hukum) bisa menelusuri lebih mendalam," pungkasnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005